



BERI PENJELASAN - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dan Dirjen Perdagangan dalam Negeri Syailendra memberikan keterangan kepada wartawan mengenai laju inflasi di DIY, Kamis (27/10).

Sultan Minta Perhatikan Laju Kenaikan Inflasi DIY

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah DIY berkomitmen menjaga inflasi pada angka normal hingga akhir tahun 2022. Hal ini mengingat tingginya inflasi disebut bakal menambah beban hidup masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III di Gedung Pracinosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sultan mengatakan, merujuk pada laporan perekonomian DIY yang disusun oleh Perwakilan Bank Indonesia DIY per Agustus 2022, pertumbuhan ekonomi DIY sampai triwulan II mencapai 5,2% yoy (year on year) atau lebih tinggi dibandingkan Triwulan I, 2022 sebesar 2,91% yoy.

Kinerja positif tersebut didorong oleh berbagai peningkatan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi lapangan usaha pada hampir semua sektor ekonomi utama di DIY. Hal ini menjadi indikasi terjadinya perbaikan aktivitas ekonomi, dan kondisi aktivitas masyarakat yang sudah mendekati kondisi normal.

Meski mengalami pertumbuhan ekonomi, inflasi DIY pada triwulan II 2022 berada pada angka 5,33% yoy atau lebih tinggi dari triwulan I sebesar 1,5% yoy. "Tetap perlu menjadi perhatian bersama, bahwa peningkatan aktivitas ekonomi Triwulan II tersebut dibarengi dengan tekanan inflasi DIY yang kian meningkat. Inflasi DIY pada triwulan II, 2022 pada level 5,33% year on year, lebih tinggi dari triwulan I sebesar 1,5% year on year," jelas Sri Sultan.

Inflasi bersumber dari beberapa hal yaitu meningkatnya permintaan dan mobilitas pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan musim liburan, imbas dari tekanan harga komoditas global serta dampak penyesuaian harga komo-

ditas. Dengan kondisi ketidakpastian global di tengah tensi geopolitik, maka perlu ada kewaspadaan pada tekanan inflasi yang diperkirakan masih berlanjut hingga 2023. Terkait hal tersebut, Pemda DIY bersama TPID menjalankan kebijakan-kebijakan kunci untuk menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif dan dukungan kerjasama antar daerah, melalui program OPD terkait yang akan dioptimalkan pada triwulan IV Tahun 2022.

"Program pengendalian inflasi pangan berpotensi mendukung ketahanan pangan, serta dapat dikolaborasi dengan program pengentasan kemiskinan nasional. Hal ini tidak hanya penting bagi pemulhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat," kata Sri Sultan.

Sementara Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri RI, Syailendra mengatakan, angka inflasi di Indonesia secara umum memang mengalami kenaikan. Hal ini tidak lepas dari terjadinya krisis keuangan global yang membuat sejumlah negara menghadapi nasib serupa.

Meski demikian, Kondisi di Indonesia masih tergolong baik jika dibandingkan dengan beberapa anggota negara G20 lainnya. Pemerintah Daerah pun didorong untuk terus menjaga ketersediaan dan stabilitas barang pokok di daerahnya.

"Yang paling utama adalah menjaga ketersediaan seluruh bahan pokok sehingga masyarakat tidak kekurangan. Kedua tentu menjaga stabilitas harga agar masyarakat dapat menjangkau bahan kebutuhan pokok," bebernya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005